

# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

## LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Periode 2023

Kode Satker : 402017

A decorative graphic element consisting of several overlapping, semi-transparent green polygons with white outlines, creating a complex, crystalline shape that frames the contact information.

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Kelurahan Mulia Agung  
Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan  
Telp/Fax. (0711) 5723669  
e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN  
PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BALAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan**

**Telp/Fax. (0711) 5723669**

**e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat S-21/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 27 Juli 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
**ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.**  
NIP.19761203 201101 1 005

# DAFTAR ISI

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca .....	7
III. Laporan Operasional .....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	12
A. Penjelasan Umum .....	12
A.1. Dasar Hukum .....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai .....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
A.4. Basis Akuntansi .....	15
A.5. Dasar Pengukuran .....	15
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	23
B.2. Belanja .....	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	25
C.1. Aset Lancar .....	25
C.2. Aset Tetap .....	25
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	25
C.6. Ekuitas .....	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	27
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	27
D.2. Beban Pegawai .....	28
D.3. Beban Persediaan .....	28

D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	28
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	28
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	28
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	29
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	29
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	29
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	29
D.11.	Beban Lain-lain .....	29
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	30
D.13.	Pos Luar Biasa .....	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	30
E.1.	Ekuitas Awal .....	30
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	30
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	30
E.3. 2.	Koreksi Nilai Persediaan .....	30
E.3. 3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	31
E.3. 4.	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	31
E.3. 5.	Koreksi Lain-lain .....	31
E.3. 6.	Ekuitas Akhir .....	31
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	31
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	31
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	31

## *DAFTAR TABEL*



## Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022	2
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2023	23
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023	23
Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022	24

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III  
Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/fax : (0711)-5723669 e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 27 Juli 2023  
Kasua Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
**ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.**  
NIP.19761203 201101 1 005

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp187.800.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi untuk Semester I TA 2023 sebesar Rp86.363.905,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Aset Semester I Tahun 2023 per 30 Juni 2023 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp(114.765.750),- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah), kewajiban sebesar Rp(114.765.750),- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),- dan Ekuitas sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2023	2022	Rp	%
<b>Aset Lancar</b>				
Persediaan	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>114.765.750</b>	<b>0</b>	<b>15.650.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>114.765.750</b>	<b>0</b>	<b>114.765.750</b>	<b>0.00</b>
<b>Ekuitas</b>				
Jumlah Ekuitas	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>114.765.750</b>	<b>0</b>	<b>114.765.750</b>	<b>0.00</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester I Tahun 2023 untuk periode 2023, pendapatan Operasional sebesar Rp28.103.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah), Beban Operasional Rp93.308.402,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua rupiah), Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp(65.205.420),- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 Juni 2023 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp0, Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(65.205.420),- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp0.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**  
*( dalam satuan Rupiah )*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
A.I.1	<b>PENERIMAAN NEGARA</b>	35.698.000	28.103.000	(7.595.000)	79
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.698.000	28.103.000	(7.595.000)	79
A.I.2	<b>HIBAH</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>35.698.000</b>	<b>28.103.000</b>	<b>(7.595.000)</b>	<b>79</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>				
B.I.1	<b>Rupiah Murni</b>	187.800.000	86.363.905	101.436.095	46
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0
B.I.1.b	Belanja Barang	187.800.000	86.363.905	101.436.095	46
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
B.I.2	<b>Pinjaman dan Hibah</b>	0	0	0	0
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>187.800.000</b>	<b>86.363.905</b>	<b>101.436.095</b>	<b>46</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
C.I	<b>PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)</b>	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
C.II	<b>PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)</b>	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## II. Neraca

### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

#### NERACA

PER 30 JUNI 2023

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.650.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	99.115.750
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>114.765.750</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>114.765.750</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang kepada Pihak Ketiga I	99.115.750
Uang Muka dari KPPN	15.650.000
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>114.765.750</b>

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2023 DAN 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	30 JUNI 2023	2022
<b>Kegiatan Operasional</b>		
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	28.103.000	11.624.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>28.103.000</b>	<b>11.624.000</b>
<b>Beban</b>		
Beban Pegawai	0	0
Beban Persediaan	43.982.740	11.481.393
Beban Barang dan Jasa	33.645.680	13.000.000
Beban Pemeliharaan	0	0
Beban Perjalanan Dinas	15.680.000	8.241.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Beban Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>93.308.420</b>	<b>32.722.393</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(65.205.420)</b>	<b>(21.098.393)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>		
Beban Luar Biasa	0	0
<b>Surplus (Defisit) LO</b>	<b>(65.205.420)</b>	<b>(21.098.393)</b>

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2023 DAN 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(65.205.420)	(21.098.393)	(44.107.027)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	-
Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	65.205.420	21.098.393	44.107.027	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

V. *CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK/.05/2016.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

**(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

**(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp28.103.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp28.103.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) atau mencapai 73 persen. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.698.000	28.103.000	73
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>35.698.000</b>	<b>28.103.000</b>	<b>73</b>

### B.2. Belanja

*Realisasi Belanja  
Negara :  
Rp86.363.905*

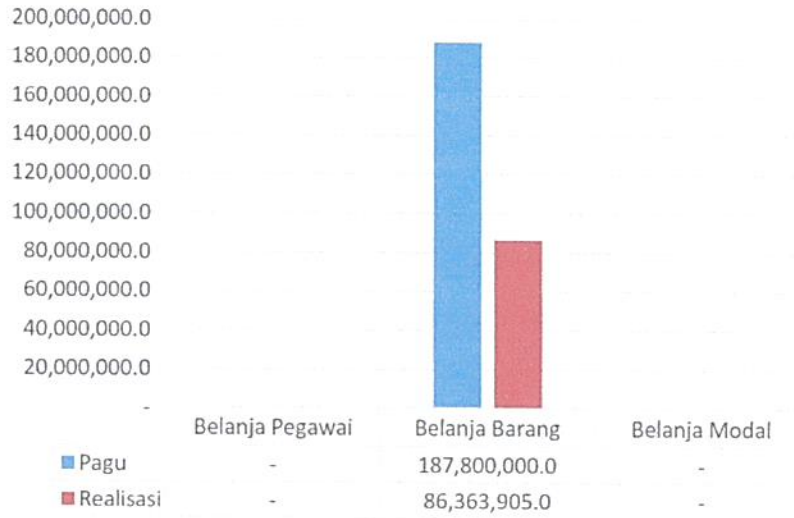
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp86.363.905,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dari anggaran senilai Rp187.800.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	187.800.000	86.363.905	36
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>187.800.000</b>	<b>86.363.905</b>	<b>36</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Juni 2023

#### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai : Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 Rp0, dari anggaran awal sebesar Rp0.

#### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang :  
Rp86.363.905

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp86.363.905,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dari anggaran senilai Rp187.800.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

#### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi  
Belanja Modal :  
Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2023 adalah Rp0, dari anggaran Rp0.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:  
Rp114.765.750*

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 sebesar Rp114.765.750,- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp15.650.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 sebesar Rp15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

#### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2023 sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

#### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp0*

Persediaan periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:  
Rp0*

Nilai Aset Tetap periode 30 Juni 2023 tersaji sebesar Rp0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

**C.2.1. Tanah**

*Tanah : Rp0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.-

**C.2.2. Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan Mesin : Rp0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan Bangunan : Rp0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

**C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan**

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

**C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

*Aset Tetap Lainnya : Rp0* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

**C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0* Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni 2023 sebesar Rp0,-

**C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp0* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

**C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

*Kewajiban Jangka Pendek : Rp114.765.750,-* Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 Juni 2023 sebesar Rp114.765.750,- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp15.650.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 sebesar Rp15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Ekuitas

Ekuitas:  
Rp0

Ekuitas periode 30 Juni 2023 sebesar sebesar Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNbp :  
Rp28.103.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.103.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) dan Rp11.624.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

### D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :  
Rp0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp43.982.740*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp43.982.740,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Rp11.481.393,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa :  
Rp33.645.680*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.645.680,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

### D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan  
Dinas :  
Rp15.680.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.680.000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp8.241.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat : Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **D.13. Pos Luar Biasa**

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

## **E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0.

### **E.2. Surplus (defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(65.205.420),- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Rp(21.098.393),- (dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0.

#### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir

pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.3.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### **E.3.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.



### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

### **F.2.4. Revisi DIPA**

1. Revisi I tertanggal 18 April 2022

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

-Nihil

# LAPORAN PENDUKUNG



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2022**



DS:1509-8601-4425-0870

**Revisi ke 01**

Tanggal : 18 April 2022

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	: (03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	: (11)	SUMATERA SELATAN
4. Kode>Nama Satker	: (402017)	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Sebesar	: Rp.	73.905.000 ( TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	73.905.000
Rp.	73.905.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	73.905.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 73.905.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1509-8601-4425-0870

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Salter : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			73.905.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73.905.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum			
		2. 02	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan			
		3. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
		4. 04	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
		5. 05	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		6. 06	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	120,00	Perkara	49.905.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	120,00	Perkara	49.905.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	240,00	Orang	24.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Pos Bantuan Hukum (PN)	240,00	Orang	24.000.000

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022**



DS:1509-8601-4425-0870

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	73.905.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	73.905.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.		0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022**



DS:1509-8601-4425-0870

**II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	73.905	-	-	-	73.905		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	73.905	-	-	-	73.905		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	73.905	-	-	-	73.905		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	49.905	-	-	-	49.905	11.09	
01	RM	-	49.905	-	-	-	49.905	160	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	24.000	-	-	-	24.000	11.09	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	160	
<b>JUMLAH</b>		-	73.905	-	-	-	73.905		

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1509-8601-4425-0870

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	402017	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	0	0	6.000	16.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	9.113	73.905
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	0	0	6.000	16.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	9.113	73.905
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	0	0	6.000	16.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	9.113	73.905
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	6.000	16.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	9.113	73.905
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.354	16.028
		- PNB (425231)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20
		- PNB (425232)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	730
		- PNB (425233)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
		- PNB (425239)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.015	12.158

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022  
IV A. B L O K I R**



DS:1509-8601-4425-0870

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ltd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2022  
IV B. C A T A N**



DS:1509-8601-4425-0870

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttid.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2023  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : ( 402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/23 6:00 AM  
 Tgl Cetak : 30/07/23 11:33 AM  
 Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,650,000	0	15,650,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	99,115,750	0	99,115,750	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>114,765,750</b>	<b>0</b>	<b>114,765,750</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>114,765,750</b>	<b>0</b>	<b>114,765,750</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	99,115,750	0	99,115,750	0.00
Uang Muka dari KPPN	15,650,000	0	15,650,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>114,765,750</b>	<b>0</b>	<b>114,765,750</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>114,765,750</b>	<b>0</b>	<b>114,765,750</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>114,765,750</b>	<b>0</b>	<b>114,765,750</b>	

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalan Balai, 30 Juli 2023  
 Bertanggung Jawab UAKPA  
 SEKRETARIS  
  
 ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom  
 199612032011011005



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03  
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 402017

Tgl Data : 30/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 30/07/23 11:33 AM  
Halaman : 2  
lap\_fra\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	187,800,000	86,363,905	101,436,095	46	73,905,000	26,363,750	47,541,250	36
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : ( 402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 30/07/23 11:33 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(65,205,420)	(21,098,393)	(44,107,027)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	65,205,420	21,098,393	44,107,027	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2023  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : ( 402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/23 6:00 AM  
 Tgl Cetak : 30/07/23 11:34 AM  
 Halaman : 1  
 lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28,103,000	11,624,000	16,479,000	141.767
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	28,103,000	11,624,000	16,479,000	141.767
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	28,103,000	11,624,000	16,479,000	141.767
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	43,982,740	11,481,393	32,501,347	283.078
Beban Barang dan Jasa	33,645,680	13,000,000	20,645,680	158.813
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	15,680,000	8,241,000	7,439,000	90.268
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/07/23 11:34 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>93,308,420</b>	<b>32,722,393</b>	<b>60,586,027</b>	<b>185.152</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(65,205,420)</b>	<b>(21,098,393)</b>	<b>(44,107,027)</b>	<b>209.054</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(65,205,420)</b>	<b>(21,098,393)</b>	<b>(44,107,027)</b>	<b>209.054</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(65,205,420)</b>	<b>(21,098,393)</b>	<b>(44,107,027)</b>	<b>209.054</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalan Balai, 30 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom

197612032011011005



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			167,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			167,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			67,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			67,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			13,200,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	31,429	13,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu )			54,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	130,000	54,600,000	
052	Penetapan hari sidang			50,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			50,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	167	50,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			22,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			22,700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			2,400,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			20,300,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	135,334	20,300,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			13,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			13,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			2,400,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	48,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			11,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	55,000	11,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			33,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			33,100,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			33,100,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	78,810	33,100,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			3,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,800,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			3,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
058	<b>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>2,950,000</b>	<b>U</b>
A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>2,950,000</b>	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	280,000	1,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			1,550,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	180,000	900,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	130,000	650,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] ----- Lokasi : KAB. BANYUASIN	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	33.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu )			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Picket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 26 Juli 2023  
 KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
  
**ANDRIANTO FACHRIZAL S. Kom**  
 NIP 197612032011011005

## KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

**Tingkat Satker (Non BLU)**

Periode : Semester I, T.A 2023

Kode Satker : 402017  
 Nama Satker : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai  
 Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi  
 Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan.</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. LRA <i>face</i> per 31 Desember 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
2. Neraca per 31 Desember 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
3. Laporan Operasional per 31 Desember 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
<b>Lampiran Pendukung Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Persamaan dasar akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
<b>KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Saldo Awal Aset 2015 = Total Aset Audited 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2015 = Total Kewajiban Audited 2014 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2015 = Total Ekuitas Dana Audited 2014 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
<b>NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>Pengecekan Saldo Tidak Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tidak

<b>Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) <i>(kec.Penyisihan dan Akumulasi)</i>			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) <i>(kec.Pengembalian Pendapatan)</i>			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)			Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"			Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
<b>Hibah Langsung</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.			Ya
2. akun 218211 di kredit			Ya
<b>Pengecekan akun tertentu</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)			Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)			Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			

9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg

10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif

Pengecekan antar laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxxx?			Ya

*Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.*

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Tidak

*Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK*

*Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.*

### NERACA

Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama

Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?			Tidak

Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
----------------------------------	-----	-------	------------

*Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"*

1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang			Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada/Tidak
2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak
Beban Persediaan (di LO)			Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL			Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada/Tidak

Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka			Ada/Tidak
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka			Ada/Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan			Ada/Tidak

**TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)**

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)			Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)			Sama

*Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menaunakan menu vana sesuai atau belum.*

	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) <i>kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC</i>			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) <i>kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC</i>			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?			Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?			Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?			Ya
Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL <i>(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)</i>			Ya

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL

  
(Eunike Mayerni Batubara, A.Md.A.B)  
NIP 199905222022032007

Pangkalan Balai, 27 Juli 2023  
Penelaah  
  
(Andrianto Fachrizal, S.Kom)  
NIP. 197612032011011005

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"*